

BAB V

KESIMPULAN

Secara global, Thailand dikenal sebagai negara yang memiliki permasalahan perdagangan manusia produktif di Asia Tenggara. Thailand sebagai negara dengan letak geografis yang strategis dan perkembangan industri yang lebih maju dari negara sekitar di kawasan Asia Tenggara. Faktor pesatnya perkembangan ekonomi Thailand adalah melalui sektor pariwisata dimana pariwisata sebagai salah satu dari pilar ekonomi utama sehingga sektor pariwisata Thailand terus menarik wisatawan dari seluruh dunia. Berbagai sumber merilis laporan, grafik dan indeks bahwa Thailand terutama Bangkok, Phuket, Chiang Rai dan Songkhla adalah kota-kota yang paling banyak dikunjungi wisatawan asing di seluruh dunia dan menempatkan negara ini diperingkat pertama di Asia bahkan di dunia seperti yang dirilis oleh *United Nations Economic And Social Commission for Asia and The Pasific (ESCAP)* pada tahun 2009, *Pasific Asia Travel Association (PATA)* pada tahun 2015, *WTTC - Travel and Tourism Economic Impact 2016Thailand, Top Five Fastest Growth Destinations 2014-2018* dan *Mastercard Global Destination Cities Index*. Pencapaian tersebut membuktikan Thailand berhasil mempromosikan industri pariwisata yang kemudian merambah ke industri lokal lainnya. Namun dari perkembangan industri pariwisata Thailand yang telah diakui internasional, nyatanya tidak semua memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif.

Dengan terbukanya sektor pariwisata Thailand yang bersifat liberal memudahkan berbagai aktivitas global terjadi di negara tersebut. Perkembangan pariwisata Thailand menjadikan negara tersebut rentan akan praktik perdagangan manusia terutama anak-anak. Ditambah lagi dengan posisi Thailand sebagai tujuan negara transit dan tujuan bagi migran yang menuju atau dari Asia. Semakin pesat perkembangan

pariwisata Thailand maka semakin pesat pula kesempatan para oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan aksi kejahatan perdagangan manusia. Di Thailand bentuk-bentuk perdagangan manusia untuk eksploitasi melalui pelacuran orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, untuk kerja paksa atau layanan dan perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan dan untuk eksploitasi dengan mengemis. Salah satu bentuk perdagangan manusia adalah sebagai pekerja seks komersial.

Perkembangan industri pariwisata tersebut juga memunculkan industri seks yang disebut dengan pariwisata seks. Para pekerja seks komersial tersebut sebagian besar adalah dari para migran, suku pegunungan dari Thailand bagian utara atau korban penyelundupan manusia untuk diperdagangkan. Dari seluruh pekerja seks 20% adalah anak-anak dibawah umur. Bahkan menurut PBB melalui *Action for Cooperation Against Trafficking in Persons* bahwa pariwisata seks menjadi faktor pemicu pasokan perdagangan manusia untuk dieksploitasi secara seksual.

Semakin maraknya isu pariwisata seks anak di negara ini, Thailand bahkan telah memiliki *image* di seluruh dunia sebagai negara tujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, karena mayoritas pelaku kejahatan eksploitasi pariwisata seks anak adalah orang Barat atau orang luar Thailand. Namun hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata adalah pendongkrak perekonomian negara tersebut sehingga banyak masyarakat yang justru mengabaikan dan melegalkan kejahatan tersebut. Fenomena ini yang memicu keprihatinan global melihat bagaimana terus maraknya perdagangan manusia terutama anak-anak yang terseret dalam industri seks pariwisata di Thailand.

Bentuk keprihatinan tersebut diungkapkan dari berbagai kalangan seperti LSM internasional maupun lokal dari dalam negeri Thailand sendiri dan dari negara lain, aktivis, universitas dan mahasiswa. LSM tersebut menyatakan

bahwa perdagangan manusia terutama anak-anak di Thailand sangat serius dan banyak suku pinggiran sangat rentan untuk dieksploitasi bahkan UNESCO menyetujui argumen tersebut dengan menambahkan bahwa Thailand tidak memiliki hukum yang cukup kuat untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia ini. Bangkok dan Phuket yang terus menjadi sorotan aksi perdagangan manusia kini mulai merambah ke kawasan Chiang Mai dan Chiang Rai dibagian utara Thailand. Tidak hanya UNESCO, LSM lain pun memberikan respon yang sama bahwa undang-undang di Thailand masih lemah dalam hal eksploitasi anak khususnya di sektor pariwisata. Akibat dari lemahnya undang-undang dan tidak sebandingnya hukuman yang diterima bagi si pelaku, bahkan salah satu kasus yang terjadi di Thailand dimana oknum perdagangan manusia dan suap yang dilakukan oleh aparat negara yaitu seorang jendral militer angkatan darat Thailand, Manas Kongpaen yang mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Dalam skripsi ini, penulis melihat menggunakan teori *Trans-national Advocacy Networks* bahwa keprihatinan yang tak hanya datang dari dalam negeri Thailand namun juga global dan melakukan advokasi. Salah satu LSM yang didirikan di Thailand bernama *End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes* atau ECPAT yang kini berbasis di Bangkok secara khusus memerangi eksploitasi seks komersial anak di dunia ini mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari berbagai pihak sehingga kini ECPAT telah memiliki jaringan di 93 negara di dunia. Dukungan terus datang dari antar LSM lain baik di dalam negeri Thailand dan luar Thailand, Kepolisian Kerajaan Thailand, pemerintah dari negara lain, media, masyarakat, mahasiswa, perusahaan bisnis perjalanan dan pariwisata dan juga PBB. Mereka mendukung ECPAT untuk menyelamatkan anak-anak sebagai korban eksploitasi pariwisata seks. Dukungan untuk ECPAT terus mengalir baik dari internal maupun eksternal. Dengan dukungan tersebut, peran-peran dan program dari ECPAT menjadi jaringan yang lebih kuat guna memerangi eksploitasi seks anak-anak.

Lemahnya undang-undang yang dimiliki Thailand menjadi akibat terus maraknya kejahatan perdagangan manusia terutama anak-anak yang rentan. Pada tahun 1990-an, Thailand telah membuat undang-undang untuk perlindungan anak dan wanita. Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dirasa hanya berpihak pada anak perempuan dan wanita saja karena banyak ditemukan kasus bahwa korban tak hanya anak perempuan tetapi juga anak laki-laki. Kemudian pemerintah menciptakan undang-undang Tindakan Perlindungan Anak pada tahun 2003 (*Child Protection Act of 2003*), namun undang-undang kembali mendapat kritikan dari berbagai pihak. Mereka mengkritik bahwa undang-undang ini tidak mendefinisikan eksploitasi seksual terhadap anak-anak secara spesifik. Selain itu, dalam undang-undang tersebut memiliki hukuman yang tidak sepadan dengan aksi kejahatan perdagangan manusia dan tidak sesuai dengan implementasinya. Dengan banyaknya kritikan, pemerintah akhirnya mengeluarkan undang-undang baru pada tahun 2008 yaitu Tindakan Anti Perdagangan Perorangan (*The Anti-Trafficking in Persons Act of 2008*).

Seperti namanya, undang-undang tersebut terfokus pada perdagangan manusia. Keberhasilan undang-undangan ini adalah lahirnya komite-komite di tingkat propinsi di Thailand. Namun, komite-komite tersebut tidak menyebar keseluruh propinsi di Thailand. beberapa aktivis berpendapat bahwa ketidakmerataan tersebut masih dimanfaatkan oleh oknum untuk menyelundupkan manusia. Terlebih lagi, aksi perdagangan manusia semakin tersistematik dengan membangun jaringan yang tak hanya melibatkan orang-orang Thailand saja tetapi dari negara sekitar. Kelemahan undang-undang ini adalah adanya hambatan dalam keadilan dan proses penuntutan yang sulit dan rumit serta kurangnya kerjasama pemerintah dengan pihak lain. Selain itu, undang-undang ini masih tidak berpengaruh bagi aparat negara yang turut tersandung kasus perdagangan manusia. Padahal Thailand menjadi salah satu negara yang meratifikasi dan menandatangani perjanjian-perjanjian di ASEAN yang

menyangkut perlindungan dan hak-hak anak serta Konvensi Hak Anak (*The Convention On The Rights Of The Child*), namun kenyataannya Thailand masih menjadi negara yang berjuang untuk mengurangi eksploitasi seks anak.

Dengan peran ECPAT yaitu memberikan kesadaran pada masyarakat, kampanye dan diskusi, program-program yang melibatkan LSM lain, aktor MNC, masyarakat sipil bahkan pemerintah, ECPAT mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan jaringan yang terus dijalin secara intensif, merilis berbagai laporan, memonitor kegiatan pariwisata untuk mencegah wisatawan yang memiliki tujuan untuk mengeksploitasi anak-anak serta mengumpulkan data-data sebagai alat advokasi pemerintah untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan, ECPAT berhasil dalam mengubah undang-undang di Thailand yang sejak lama memiliki kelemahan.

Peran ECPAT berhasil mempengaruhi pemerintah dimana pemerintah Thailand memperbaharui *Nation Plan of Action* pada tahun 2011 sebagai tindakan global baru dan tekad secara internasional memerangi eksploitasi seksual terhadap anak-anak termasuk dalam sektor pariwisata. Jika selama ini pemerintah hanya memprioritaskan dan terfokus pada permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Thailand, dalam *Nation Plan of Action 2011* tersebut pemerintah Thailand menjalin kerjasama dengan negara sekitar seperti Kamboja, Vietnam dan Filipina untuk menekan korban anak dalam pariwisata seks. Dalam undang-undang baru tersebut Thailand mengeluarkan perjanjian yuridiksasi dengan negara-negara sekitar Thailand di Asia Tenggara. Walaupun telah dibentuk *Nation Plan of Action* pada tahun 2011, perdagangan manusia terutama anak-anak dalam industri pariwisata seks tetap menjadi permasalahan serius di Thailand sehingga ECPAT terus melakukan kampanye dan program-program lainnya untuk menyadarkan masyarakat luas akan pentingnya melindungi hak-hak anak.

Dengan koordinasi yang intensif dan terus aktif peran ECPAT bersama jaringan global, berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah Thailand. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari teori *Trans-national Advocacy Networks* dimana sebuah sekumpulan orang yang berdedikasi untuk mempromosikan gagasan atau isu non-tradisional menjadi isu global dengan membentuk jaringan advokasi internasional dari berbagai aktor yang terlibat. Berdasarkan dari metode advokasi bahwa ECPAT menggunakan metode yang melakukan proses secara legislasi dan yudikatif bahwa mereka mengajukan keinginan untuk mengubah undang-undang lama yang kemudian diperbaharui bersama dengan pemerintah yang kemudian ke parlemen sehingga akhirnya disepakati dengan diperbaharuinya *National Plan Action* tahun 2011. Melalui hasil kampanye YPP yang mengumpulkan 15.000 tanda tangan masyarakat Thailand sebagai bentuk upaya dukungan mereka terhadap permasalahan pariwisata seks anak di negaranya, 15.000 tanda tangan tersebut sebagai pengajuan alat advokasi kepada pemerintah yang kemudian ECPAT merancang rancangan undang-undang yang baru sebagai naskah hukum. ECPAT yang juga sebagai mitra pemerintah melakukan lobi dan negosiasi dimana ECPAT memiliki posisi Sub-Komite Ad-hoc Nasional di Thailand yang juga turut dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak.